

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, UPAH MINIMUM PROVINSI DAN KESEMPATAN KERJA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI JAMBI

Mainita, Dea Cahyani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Provinsi dan Kesempatan Kerja Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi. Alat analisis pada penelitian ini menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan PDRB Provinsi Jambi berfluktuasi dengan rata-rata sebesar 3,65%. Perkembangan UMP rata-rata sebesar 9,13%, perkembangan kesempatan kerja berfluktuasi dengan rata-rata sebesar 0,06%. Variabel UMP dan Kesempatan kerja berpengaruh signifikan dan berlawanan arah terhadap jumlah penduduk miskin. Sedangkan variable PDRB tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

Kata Kunci : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Provinsi, Kesempatan Kerja, Penduduk Miskin

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional, oleh karena itu upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komperensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu Prasetyo (2010). Masalah kemiskinan ini terus menjadi masalah di semua Negara, khususnya Indonesia yang merupakan Negara berkembang.

Kemiskinan ini adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal dan kesehatan. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan. Kemiskinan tidak hanya berkenaan dengan tingkat pendapatan tetapi juga dari aspek sosial, lingkungan, bahkan keberdayaan dan partisipasi. Menurut Dewanto (2014) kemiskinan jangan hanya dianggap sebagai sebuah pendapatan yang rendah (*low income*), tetapi harus dianggap sebagai ketidakmampuan kapabilitas atau (*capability handicap*). Dengan demikian kemiskinan tidak bisa hanya dipandang dari suatu sisi rendahnya pendapatan tetapi harus dari banyak aspek lain yang saling berkaitan sehingga bersifat multidimensi.

Program penanggulangan angka kemiskinan mutlak diperlukan agar semua kebijakan pemerintah dapat lebih terarah dan tepat sasaran. Untuk menyusun program penanggulangan kemiskinan maka perlu dilakukan kajina yang mendalam tentang faktor-faktor yang bereran penting dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan faktor lainnya. Pertumbuhan ekonomi

yang tinggi dan disertai pemerataan hasil pertumbuhan keseluruhan sektor usaha sangat dibutuhkan dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan mencapai maksimum apabila kondisi tingkat tenaga kerja penuh (*Full Employment*) dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan, dan akan mengurangi tingkat kemakmuran. Semakin turun tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan (Maipita, 2014).

Nilai PDRB merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur suatu kesejahteraan suatu wilayah dan perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Semakin meningkatnya PDRB menunjukkan bahwa produk yang meningkat akan meningkatkan pendapatan seseorang sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari data upah minimum provinsi diatas dapat dilihat bahwa nilai upah minimum provinsi Jambi tiap tahunnya mengalami nilai kenaikan yang cukup signifikan selama tahun 2016 sampai dengan 2020, nilai ini dapat menggambarkan bahwa para pekerja yang ada di provinsi Jambi sudah selayaknya mendapatkan upah yang cukup layak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya selama satu tahun, dengan upah minimum yang cukup dapat menghindarkan para pekerja dari himpitan kemiskinan.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menentukan bahwa Pemerintah dalam hal ini Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau bupati/walikota, menetapkan upah minimum berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak dan perlindungan pengupahan, penetapan upah minimum dan pengenaan denda terhadap pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaian diatur dengan peraturan pemerintah (Hardijan Rusli, 2011).

Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi dan Kesempatan Kerja dapat memberikan dampak terhadap jumlah penduduk miskin di suatu daerah, tidak terkecuali di Provinsi Jambi, untuk melihat jumlah Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi, Angkatan Kerja dan jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Jambi, dapat dilihat pada tabel yang ada dibawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah PDRB, Upah Minimum Provinsi, Kesempatan Kerja dan JumlahPenduduk Miskin di Provinsi Jambi 2017-2021

Tahun	PDRB (Milyar Rupiah)	UMP(Rp)	Kesempatan Kerja (%)	Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)
2017	136,501,71	2,063,948	96.13	286,55
2018	142,902,00	2,243,718	96.14	281,69

2019	149,111,09	2,400,000	95.81	274,32
2020	148,448,82	2,630,000	94.87	277,80
2021	153,881,69	2,649,034	94.90	293.86

Sumber: BPS Provinsi Jambi. 2021

Dari uraian-uraian di atas maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan PDRB, Upah Minimum Provinsi dan Kesempatan Kerja di Provinsi Jambi dan bagaimana pengaruh PDRB dan Upah Minimum Provinsi dan Kesempatan Kerja terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Ada beberapa model pertumbuhan ekonomi yang berkembang hingga saat ini yaitu : Teori Pertumbuhan Klasik, Teori pertumbuhan Neo Klasik, model pertumbuhan Regional, dan pertumbuhan Kuznet.

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi klasik merupakan salah satu dasar dari teori pertumbuhan yang dipakai baik dari dulu sampai sekarang. Teori pertumbuhan ekonomi klasik dikemukakan oleh tokoh-tokoh ekonomi seperti Adam Smith dan David Ricardo.

Menurut Smith Arsyad (2013) membedakan dua aspek utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu: pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Pada pertumbuhan output total sistem produksi suatu negara dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Sumber Daya Alam yang tersedia
- b. Sumber Daya Insansi
- c. Stock Barang ModaL

2. Teori Neo Klasik

Teori neo klasik yang dipelopori oleh Robert Solow menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan produk nasional ditentukan oleh pertumbuhan dua jenis input yaitu pertumbuhan modal dan pertumbuhan tenaga kerja. Perhatian terhadap dua input tersebut sangat besar karena proses ekonomi memerlukan adanya intensifikasi modal, yaitu suatu proses jumlah modal per tenaga kerja naik setiap saat dan adanya kenaikan tingkat upah yang dibayarkan kepada para pekerja pada saat intensifikasi modal terjadi, sehingga masyarakat mempunyai daya beli tinggi, konsumsi meningkat.
- b. Menurut Robert Solow faktor yang paling penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah kemajuan teknologi dan peningkatan keahlian serta keterampilan para pekerja dalam menggunakan teknologi.

3. Teori Keynesian

Teori Keynesian, yang dipelopori oleh J.M. Keynes menyatakan bahwa dalam jangka pendek output nasional dan kesempatan kerja terutama ditentukan

oleh permintaan agregat. Kaum Keynesian yakin bahwa kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal harus digunakan untuk mengatasi pengangguran dan menurunkan laju inflasi. Konsep-konsep Keynesian menunjukkan bahwa peranan pemerintah sangat besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.

4. Teori Harrod-Domar

Salah satu teori pertumbuhan mengenai pembangunan adalah model pertumbuhan Harrod-Domar. Model pertumbuhan ini, secara sederhana dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan dari GNP ($\Delta Y/Y$) ditentukan oleh rasio tabungan nasional (s) dan rasio capital output nasional (k). Sementara, infrastruktur disini dapat dikategorikan ke dalam *Capital Stock* (K) sehingga secara tidak langsung, dapat dikatakan bahwa peningkatan stok kapital termasuk infrastruktur akan berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi.

Teori pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh Harrod-Domar bahwa investasi memiliki peran dalam perekonomian yaitu merupakan bagian dari pengeluaran agregat dan sebagai penambah jumlah barang-barang modal dalam masyarakat. Dengan kata lain, investasi akan mempertinggi kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang produksi.

Pada model Harrod-Domar investasi diberikan peranan yang sangat penting. Dalam jangka panjang investasi mempunyai pengaruh kembar. Di satu sisi investasi mempengaruhi permintaan agregat di sisi lain investasi mempengaruhi kapasitas produksi nasional dengan menambah stok modal yang tersedia.

Berdasarkan teorinya, Harrod-Domar berkesimpulan apabila pengeluaran agregat meliputi komponen yang lebih banyak, yaitu meliputi pengeluaran pemerintah dan ekspor. Dalam keadaan yang demikian barang-barang modal yang bertambah dapat sepenuhnya digunakan apabila $AE_1 = C + I_1 + G + (X - M)_1$ dimana $I_1 + G + (X - M)_1$ sama dengan $(I + \Delta I)$

Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementrian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada

mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari Chambers menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi, yaitu:

- 1) Kemiskinan (*Proper*) Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhankebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.
- 2) Ketidakberdayaan (*Powerless*) Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (*State of emergency*) Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.
- 4) Ketergantungan (*dependency*) Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.
- 5) Keterasingan (*Isolation*) Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.

Produk Domestik Regional Bruto

Secara umum pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dari

suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Dengan perkataan lain arah dari pertumbuhan ekonomi lebih kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitative change*) dan biasanya dihitung dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai akhir pasar (*total market value*) dari barang akhir dan jasa (*final goods and service*) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu dan biasanya satu tahun. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi secara nominal dapat digunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB digunakan untuk berbagai tujuan tetapi yang terpenting adalah untuk mengukur kinerja perekonomian secara keseluruhan. Jumlah ini akan sama dengan jumlah nilai nominal dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa, serta ekspor netto.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar. (BPS, 2012). Menurut Todaro (2012) PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut). Angka PDRB sangat diperlukan dan perlu disajikan, karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisa perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

PDRB dapat didefinisikan berdasarkan tiga pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Produksi

Dengan pendekatan Produksi (*production approach*) produk nasional atau produk domestik bruto diperoleh dengan menjumlahkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Dengan demikian, GNP atau GDP menurut pendekatan produksi ini adalah penjumlahan dari masing-masing barang dan jasa dengan jumlah atau kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan, hal ini secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut : $Y = \sum_{t=1}^n P_t Q_t$

Dimana :

Y = produk nasional atau produk nasional bruto (GNP atau GDP)

P = harga barang unit ke-1 hingga unit ke-n

Q = jumlah barang jenis ke-1 hingga jenis ke-n

2. Pendekatan Pendapatan.

Pendekatan pendapatan (*income approach*) adalah suatu pendekatan dimana pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang menyumbang terhadap proses produksi. Dalam hubungan ini pendapatan nasional adalah

penjumlahan dari unsur-unsur atau jenis-jenis pendapatan.

- a. Kompensasi untuk pekerja (*compensation for employees*)
- b. Keuntungan perusahaan (*corporate profit*).
- c. Pendapatan usaha perorangan (*proprietors income*)
- d. Pendapatan sewa (*rental income of person*)
- e. Bunga netto (*net interest*)

Secara matematis pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NI = Y_w + Y_i + Y_{nr} + Y_{nd}$$

Dimana:

Y_w = Pendapatan dari upah, gaji dan pendapatan lainnya sebelum pajak

Y_r = Pendapatan dari bunga

Y_{nr} dan Y_{nd} = Pendapatan dari keuntungan dari perusahaan dan pendapatan lainnya sebelum pendapatan lainnya sebelum pengenaan pajak.

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah pendekatan pendapatan nasional atau produk domestik regional bruto diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir (*final demand*) atas output yang dihasilkan dalam perekonomian, diukur pada harga pasar yang berlaku. Dengan perkataan lain produk nasional atau produk domestik regional bruto adalah penjumlahan nilai pasar dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi dan jasa-jasa (C), permintaan sektor bisnis barang-barang investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang-barang dan jasa-jasa (G), dan pengeluaran sektor luar negeri untuk kegiatan ekspor dan impor (X-M).

Upah

Upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, gaji, imbalan, hasil akibat (dari suatu perbuatan), resiko (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012).

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Jenis-jenis upah dalam berbagai kepustakaan Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja menurut (Zaeni Asyhadie, 2017) dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Upah Nominal

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai

kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

2) Upah Nyata (*Real Wages*)

Upah nyata adalah uang nyata, yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan tergantung dari:

- a) besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima
- b) besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan

3) Upah Hidup

Upah hidup, yaitu upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain.

4) Upah Minimum Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini umumnya ditentukan oleh pemerintah (cq. Gubernur dengan memerhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota), dan setiap tahun kadangkala berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum

5) Upah Wajar

Upah wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja/buruh sebagai imbalan atas jasanya pada perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antar upah minimum dan upah hidup sesuai dengan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Upah minimum diarahkan kepada pencapaian KHL yaitu setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang besarnya ditetapkan Menaker (Menteri Tenaga Kerja). Pencapaian KHL perlu dilakukan secara bertahap karena kebutuhan hidup minimum yang sangat ditentukan oleh kemampuan dunia usaha. (Hardijan Rusli, 2011).

Tenaga Kerja

Sumber daya manusia (SDM) atau human resources mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua dari SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau man

power. Secara singkat, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (*work-ing age population*) (Sumarsono, 2009).

Tenaga kerja memiliki beberapa definisi, menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pada UU No. 25 tahun 1997 mendefinisikan tenaga kerja adalah penduduk usia 15 tahun atau lebih, sedangkan pada undang-undang terbaru tentang ketenagakerjaan yaitu UU No. 13 tahun 2003 tidak memberikan batasan umur dalam definisi tenaga kerja, namun pada undang-undang tersebut melarang mempekerjakan anak – anak. Anak-anak menurut UU No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.

Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga (Simanjuntak, 1985). Tenaga kerja atau manpower terdiri dari angkata kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau labor force adalah bagian tenaga kerja yang ingin dan yang benar-benar menghasilkan barang dan jasa.

Kemiskinan

Menurut Chambers, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu:

- 1) kemiskinan (*proper*)
- 2) ketidakberdayaan (*powerless*)
- 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*)
- 4) ketergantungan (*dependence*), dan
- 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Secara umum kemiskinan dapat ditinjau dari dua sisi yaitu:

- 1) Kemiskinan absolut Kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Bank dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah USD \$1/hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah \$2/hari.
- 2) Kemiskinan relatif Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial di manaseseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghasilan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin. Dengan kata lain, kemiskinan relatif berkaitan erat dengan permasalahan distribusi pendapatan.

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder, Singarimbun (2011) mengungkapkan bahwa metode penelitian data sekunder ini, diperoleh dari lembaga, instansi atau lembaga-lembaga resmi yang terlebih dahulu telah mengumpulkan dan memproses data.

Analisis Data

Untuk menjawab perumusan masalah pertama didalam penelitian ini, maka penulis akan memasukan rumus perkembangan, dengan rumusan sebagai berikut:

$$G = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana

G = Perkembangan Variabel

X_t = Perkembangan Variabel tahun Ke-n

X_{t-1} = Perkembangan Variabel Tahun Sebelumnya

Untuk mendapatkan jawaban dari perumusan masalah kedua, maka digunakan alat analisis regresi linier berganda, dengan persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 \text{Log } X_3 + e$$

Dimana :

Y = Variabel Dependen (Kemiskinan)

X_1 = Variabel Independen (PDRB)

X_2 = Variabel Independen (UMP)

$\text{Log } X_3$ = Variabel Independen (Kesempatan Kerja) α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

e = Variabel Lain Yang Tidak Diteliti Atau Dimasukan Dalam Model

Pengujian Hipotesis

Untuk melihat pengaruh variabel apakah PDRB, dan ump memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Propinsi Jambi, maka hipotesis dilakukan dengan cara yaitu :

a. Uji t

Uji t merupakan pengujian signifikansi koefisien regresi parsial (individual) dengan nilai t_h dibanding dengan nilai t-tabel :

H_0 ditolak dengan kriteria t-hitung lebih besar dari t-tabel ($t_h > t_t$) pada taraf nyata sebesar α 5% berarti hipotesa nol ditolak dan hipotesa *alternative* diterima. Hal ini berarti secara individual variabel bebas (pdrb dan ump) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (kemiskinan)

H_0 diterima dengan kriteria t-hitung lebih kecil dari t-tabel ($t_h < t_t$) pada taraf nyata sebesar α 5% berarti hipotesa nol diterima dan hipotesa *alternative* ditolak. Hal ini berarti secara individual variabel bebas (pdrb dan ump) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (kemiskinan).

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

$$F_{Reg} = \frac{R(N-m-1)}{m(1-R^2)}$$

Keterangan

F_{Reg}	=	Harga F garis regresi
N	=	Cacah kasus
M	=	Cacah prediktor
R^2	=	Koefisien determinan antara kriterium dan predictor

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Bila F_{hitung} sama dengan atau lebih besar dari F_{tabel} pada taraf signifikansi 5%, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat signifikan. Sebaliknya, apabila F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} pada tingkat signifikansi 5%, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak signifikan.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas (independen) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t mempunyai nilai signifikansi $\alpha = 5\%$. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t adalah jika nilai signifikansi t (p-value) $< 0,05$, maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2014).

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan untuk melihat besarnya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Besarnya koefisien determinasi adalah $0 < R^2 < 1$. Jika angka koefisien ini mendekati 1 berarti nilainya baik, artinya semua variabel bebas yang dipilih mewakili variabel lainnya dalam melihat pengaruhnya terhadap variabel terkait. Namun jika nilai koefisiennya mendekati nol berarti variabel bebas yang dipilih kurang baik atau kurang mewakili sehingga perlu ditambah atau diganti dengan variabel lain yang dianggap dapat lebih mewakili, untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel terikat. Namun jika nilai koefisiennya mendekati nol berarti variabel bebas yang dipilih kurang baik atau kurang mewakili sehingga perlu ditambah atau diganti dengan variabel lain yang dianggap dapat lebih mewakili, untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel terikat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan PDRB Provinsi Jambi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. PDRB yang selalu menurun menyebabkan ketidakpastian bagi pembangunan di daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di daerah akan menurun jika PDRB selalu menurun tiap tahunnya. Kegiatan perekonomian juga akan menurun dan mengakibatkan pendapatan nasional mengalami kemunduran serta pengangguran yang semakin bertambah serta semakin

merajalela tingkat kemiskinan. Tingginya tingkat kemiskinan tersebut akan berdampak pada naiknya tingkat kriminalitas dalam suatu daerah.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, salah satu indikator yang mampu mengukurnya adalah dengan perhitungan tingkat kenaikan produk domestik regional bruto (PDRB) atas harga konstan. PDRB atas harga konstan menggunakan tahun dasar sebagai patokan perhitungannya. Tahun dasar merupakan suatu konsep penting yang spesifik digunakan untuk perhitungan PDB/PDRB. Salah satu manfaat dari PDRB adalah untuk mengetahui tingkat produk netto atau nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh faktor industri, laju pertumbuhan ekonomi dan pola suatu negara yang biasanya pada satu tahun.

Pada penelitian ini perumusan masalah pertama yang akan peneliti hitung adalah perkembangan Produk Domestik Regional Bruto yang ada di Provinsi Jambi selama periode 2011-2021, dan untuk melihat nilai perkembangan PDRB yang ada di Provinsi Jambi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Perkembangan PDRB Provinsi Jambi 2011-2021

Tahun	PDRB (Milyar Rupiah)	Perkembangan (%)
2011	97.740,87	-
2012	104.615,08	7,03
2013	111.766,13	6,84
2014	119.991,44	7,36
2015	125.037,40	4,21
2016	130.501,13	4,37
2017	136.501,71	4,60
2018	142.902,00	4,74
2019	149.111,09	4,40
2020	148.448,82	-0,44
2021	153.881,69	3,65
Rata-rata perkembangan		4,25

Sumber: BPS Provinsi Jambi. 2021, data diolah

Dari tabel nilai perkembangan PDRB Provinsi Jambi diatas dapat dilihat bahwa nilai perkembangan PDRB Provinsi Jambi selama periode 2011-2021 mengalami nilai perkembangan yang berfluktuatif, dengan nilai perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan nilai perkembangan sebesar 7,36% sedangkan nilai perkembangan terendahnya terjadi pada tahun 2020 dengan nilai perkembangan sebesar -0,44%, sedangkan untuk nilai rata-rata perkembangan PDRB Provinsi Jambi selama periode 2011-2021 adalah sebesar 3,65%.

Perkembangan Upah Minimum Provinsi Jambi

Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh Pemerintah menjadi sangat penting bagi pekerja, agar perusahaan yang mempekerjakannya tidak bersikap sewenang-wenang terutama dengan hal pemberian upah. Tetapi melihat kenyataannya bahwa masih terdapat tingkat upah yang belum dapat memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja, maka pemerintah telah menempuh kebijaksanaan berupa penetapan upa minimum yang jumlahnya terus mengalami

kenaikan. Upah minimum adalah upah yang paling rendah yang harus diterima oleh pekerja dari majikannya yang berlaku pada suatu daerah tertentu. Penetapan upah minimum tersebut merupakan suatu langkah kebijakan pemerintah untuk menangani lebih serius lagi permasalahan ketenagakerjaan secara umum di Indonesia dan secara khusus di Provinsi Jambi. Untuk melihat nilai perkembangan Upah Minimum di Provinsi Jambi pada tahun penelitian 2011-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Perkembangan Upah Minimum Provinsi Jambi 2011-2021

Tahun	UMP (Rp)	Perkembangan (%)
2011	1.028.000	-
2012	1.142.000	11,08
2013	1.300.000	13,83
2014	1.502.230	15,55
2015	1.710.000	13,84
2016	1.906.650	11,5
2017	2.063.948	8,24
2018	2.243.718	8,71
2019	2.400.000	15,87
2020	2.630.000	1,15
2021	2.649.034	0,72
Rata-rata perkembangan		9,13

Sumber: BPS Provinsi Jambi. 2021, data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat gambaran perkembangan upah minimum Provinsi Jambi selama periode 2011-2021, nilai perkembangan tingkat UMP terbesar terjadi pada tahun 2019 dengan nilai perkembangan sebesar 15,87%, sedangkan nilai perkembangan upah minimum provinsi yang terendah terjadi pada tahun 2021, dengan nilai perkembangan sebesar 0,72%, dan untuk nilai perkembangan rata-rata dalam penelitian ini secara keseluruhan sebesar 9,13%.

Perkembangan Kesempatan Kerja Provinsi Jambi

Kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk bekerja, yang ada dari suatu kegiatan ekonomi (produksi). Dengan demikian kesempatan kerja adalah lapangan pekerjaan yang sudah diduduki dan masih lowongan. Selain itu istilah kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi (produksi). Dengan demikian pengertian kesempatan kerja adalah mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan semua lapangan pekerjaan yang masih lowong. Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong tersebut (yang mengandung arti adanya kesempatan, kemudian timbul kebutuhan akan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja diperlukan oleh perusahaan/lembaga untuk menerima tenaga kerja pada tingkat upah, posisi, dan syarat kerja tertentu, selanjutnya dalam penelitian ini peneliti akan melihat nilai perkembangan dari kesempatan kerja yang ada dalam Provinsi Jambi. Dari data perkembangan kesempatan kerja di Provinsi Jambi selama periode penelitian 2011-2021 diatas, dapat dilihat bahwa nilai perkembangan kesempatan kerja yang ada dalam

keadaan yang fluktuatif, dengan nilai perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 0,83%, dan untuk nilai perkembangan terendah yang terjadi selama periode penelitian sebesar -1,68% yang terjadi pada tahun 2013, dan nilai perkembangan rata-rata yang didapati selama periode penelitian ini adalah sebesar -0,10%

Tabel 4.3 Kesempatan Angkatan Kerja di Provinsi Jambi 2011-2021

Tahun	Kesempatan Kerja (%)	Perkembangan (%)
2011	95.98	-
2012	96.78	0.83
2013	95.15	-1.68
2014	94.92	-0.24
2015	95.66	0.77
2016	96.00	0.35
2017	96.13	0.13
2018	96.14	0.01
2019	95.81	-0.34
2020	94.87	-0.98
2021	94.90	0.03
Rata-rata	95.58	-0,10

Sumber: BPS Provinsi Jambi. 2021, data diolah

Hasil Regresi

Analisis Regresi Linier Berganda

Dengan bantuan seri program Statistik (SPSS) for windows 20.0 diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4 Rangkuman Hasil Uji Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.6506	19462.200		1.638	.052
Pdrb	.007	.274	.996	2.134	.225
Ump	-.018	-.084	-.132	-.826	.004
kesempatan kerja	-.205	-.011	-.598	-.489	.000

a. Dependent Variable: jumlah penduduk miskin

Berdasarkan tabel 4.4 menggambarkan hasil uji statistik t menunjukkan asil sebagai berikut :

$$Y = 2,6506 + 0,007PDRB - 0,018UMP - 0,205 KK + e$$

Nilai konstan sebesar 2,6506 artinya jika tidak ada pergerakan dari faktor PDRB, UMP dan Kesempatan kerja, maka jumlah penduduk miskin akan

bergerak konstan sebesar 2,6506 jiwa.

- Variabel PDRB (X1)
Variabel PDRB dan jumlah penduduk miskin memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan. Dengan nilai regresi sebesar 0,007, berdasarkan uji statistik dengan uji T sebesar 2,134 lebih besar dari nilai Ttabel sebesar 1,859. Dengan nilai tingkat signifikan sebesar $0,225 > 0,05$, dilihat dari hasil uji secara parsial dapat dikatakan bahwa PDRB memberikan pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi
- Variabel Upah Minimum Povinsi (X2)
Variabel Upah Minimum Provinsi dan jumlah penduduk miskin memiliki hubungan yang negatif dan signifikan. Dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,018 sedangkan untuk nilai Thitung sebesar -0,826 lebih kecil dari nilai Ttabel sebesar 1,859, dan tingkat signifikansi menunjukkan angka yang signifikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$. Hasil tersebut mengatakan bahwa upah minimum provinsi memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi.
- Variabel Kesempatan Kerja (X3)
Variabel Kesempatan Kerja dan jumlah penduduk miskin memiliki hubungan yang negatif dan signifikan. Dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,205 sedangkan untuk nilai Thitung sebesar -0,489 lebih kecil dari nilai Ttabel sebesar 1,859, dan tingkat signifikansi menunjukkan angka yang signifikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut mengatakan bahwa kesempatan kerja memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak untuk digunakan sebagai model pengujian data dan hipotesis yang diajukan dengan kriteria jika $\text{sig} < 0,05$ maka model penelitian layak digunakan sebaliknya jika $\text{sig} > 0,05$ maka model penelitian tidak layak untuk digunakan. Berikut hasil penelitian uji f :

Tabel 4.5 Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	d f	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.770	3	.385	9.638	.003 ^b
	Residual	.245	8	.031		
	Total	1.014	11			

a. Dependent Variable: jumlah penduduk miskin

b. Predictors: (Constant), pdrb,ump, kesempatan kerja

Berdasarkan hasil pada tabel 4.5, maka didapatkan hasil F hitung sebesar 9,638 lebih besar dari nilai Ttabel $9,638 > 4,07$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini dapat digunakan untuk dilakukan pengujian lebih lanjut. Sedangkan jika dilihat dari nilai sig hitung adalah 0,003 yaitu $< 0,05$ yang

berarti hal ini menunjukkan bahwa variabel pdrb,ump dan kesempatan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji parsial atau uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan atau dengan kata lain untuk membuktikan apakah masing-masing variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan kesimpulan atas hasil pengujian adalah apabila *probability value* (sig)-t lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, sebaliknya jika *probability value* (sig)-t lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan tidak ada pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah untuk uji t :

**Tabel 4.6 Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.6506	19462.200		1.638	.052
Pdrb	.007	.274	.996	2.134	.225
Ump	-.018	-.084	-.132	-.826	.004
kesempatan kerja	-.205	-.011	-.598	-.489	.000

c. Dependent Variable: jumlah penduduk miskin

Berdasarkan Tabel 4.6 menggambarkan hasil uji statistik t menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. Variabel PDRB

Variabel PDRB dan jumlah penduduk miskin memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan. Dengan nilai tingkat signifikan sebesar $0,225 > 0,05$, dilihat dari hasil uji secara parsial diatas dapat dikatakan bahwa PDRB dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap jumlah kemiskinan tetapi dalam tingkat yang tidak signifikan, positif diatas dapat berupa positif dalam mengatasi jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Jambi. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mohammad Iqraam (2019) yang mana penelitiannya juga menunjukkan bahwa nilai PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali

b. Variabel UMP

Variabel UMP dan jumlah penduduk miskin memiliki hubungan yang negatif dan signifikan. Dengan tingkat signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$, hasil tersebut

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arfan Ridhoni (2018) yang dalam penelitiannya juga mendapati bahwa Upah Minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung.

c. Variabel Kesempatan Kerja

Variabel Kesempatan Kerja dan jumlah penduduk miskin memiliki hubungan yang negatif dan signifikan. Dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, variabel kesempatan kerja pada penelitian ini memiliki hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhandayani (2019) dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kesempatan kerja mempunyai pengaruh yang negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (Adjusted R²) mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Determinasi (R^2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.871 ^a	.759	.698	.17490

a. Predictors: (Constant), pdrb,ump, kesempatan kerja

Berdasarkan hasil pada tabel 4.7 didapatkan nilai Adjusted R Square dengan nilai 0,759. Hal ini berarti kemampuan PDRB, ump dan kesempatan kerja dalam menjelaskan jumlah penduduk miskin sebesar 75,9% sedangkan 24,1% dijelaskan oleh faktor lain yang berada diluar model dan tidak dapat terdeteksi dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Rata-rata nilai perkembangan PDRB Provinsi Jambi selama periode 2011-2021 mengalami nilai perkembangan yang berfluktuatif, dengan nilai perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan nilai perkembangan sebesar 7,36% sedangkan nilai perkembangan terendahnya terjadi pada tahun 2020 dengan nilai perkembangan sebesar -0,44%, sedangkan untuk nilai rata-rata perkembangan PDRB Provinsi Jambi selama periode 2011-2021 adalah sebesar 3,65%. Sedangkan untuk nilai perkembangan tingkat UMP terbesar terjadi pada tahun 2019 dengan nilai perkembangan sebesar 15,87%, perkembangan upah minimum provinsi yang terendah terjadi pada tahun 2021, dengan nilai perkembangan sebesar 0,72%, dan untuk nilai perkembangan rata-rata dalam penelitian ini secara keseluruhan sebesar 9,13%. perkembangan kesempatan kerja di Provinsi Jambi dalam keadaan yang fluktuatif, dengan nilai perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 3,37%, dan untuk

- nilai perkembangan terendah yang terjadi selama periode penelitian sebesar -4,02 yang terjadi pada tahun 2012, dan nilai perkembangan rata-rata yang didapati selama periode penelitian ini adalah sebesar -0,06%
2. Variabel UMP dan Kesempatan kerja berpengaruh signifikan dan berlawanan arah terhadap jumlah penduduk miskin. Sedangkan variabel PDRB tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

Saran

1. Upah Minimum Provinsi dan Kesempatan kerja dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi berdasarkan hasil hitungan yang telah dilakukan, dengan begitu peneliti menyarankan agar kedepannya Pemerintah Provinsi Jambi dapat lebih memperhatikan kedua variabel tersebut sebagai solusi dan alternatif dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, sedangkan untuk PDRB yang berpengaruh positif pemerintah bisa membuat PDRB positif dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat menemukan permasalahan yang baru dan mengangkat temuan baru selain temuan yang sudah peneliti lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim, 2016. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan ke-4 Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Arsyad, Lincolin, 2013, *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- BPS, 2012. *Analisis Data Kemiskinan Berdasarkan Data. Pendataan Program Perlindungan Sosial*.
- Dewanto, 2014, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kawasan Mebidangro. Sumatra Utara* (Jurnal).
- Ghozali, Imam, 2014. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi Ketiga*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Harahap, 2016. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Edisi 1-10*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hardijan Rusli, 2011. *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012. *Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kuncoro, Mudrajat, 2011. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*, UPP STIM. YKPN Yogyakarta.
- Maipita, Indra, 2014. *Simulasi Dampak Kenaikan Upah Minimum Terhadap. Tingkat Pendapatan Dan Kemiskinan*". Jurnal Ekonomi dan Keuangan,. Vol.17
- Nugroho, Adi, 2015. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Dengan Metodologi Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika
- Prasetyo, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Samuelson dan Nourdhaus, 2014. *Makro-Ekonomi*. Edisi ke- empat belas,

- Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Singarimbun, Masri, 2011. *Metode penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES.
- Suparmoko, 2014. *Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta. BPFE. UGM
- Suryawati, Indah, 2014. *Jurnalitik : Suatu Pengantar Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael, 2012. *Economic Development (11th ed)*. New York: Pearson
- Wijaya, Jakarta: PT. Grasindo.
- Zaeni Asyhadie, 2017. *Perusahaan dan. Kepailitan*. Jakarta: Erlangga